

PENDIDIKAN PERDAMAIAN SEBAGAI BAGIAN DARI PROGRAM DERADIKALISASI: SEBUAH UPAYA PENCEGAHAN GERAKAN TERORISME

PEACE EDUCATION AS A PART OF DERADICALIZATION PROGRAM: AN EFFORT TO PREVENT TERRORIST MOVEMENT

Raden Mas Jerry indrawan¹ dan Bayu Widiyanto²

Universitas Paramadina

(jerry_indrawan18@yahoo.co.id&widiyantosawyer@gmail.com)

Abstrak - Pendidikan perdamaian adalah sebuah terminologi yang belum terlalu dikenal. Istilah ini tentunya kalah pamor dibanding istilah terorisme yang tentu semua orang sudah cukup familiar dengannya. Pendidikan perdamaian berupaya mengembangkan pengetahuan, kompetensi, sikap-sikap, dan nilai-nilai yang bertujuan untuk mengubah sikap, sifat, dan pola pikir seseorang yang menciptakan atau meningkatkan kekerasan. Program deradikalisasi bertujuan untuk mengubah pola pikir teroris untuk tidak lagi menyimpang dari ajaran yang benar dan menghilangkan budaya kekerasan yang dianutnya. Karena pendidikan perdamaian adalah sebuah cara yang digunakan untuk mengembangkan budaya damai, maka pendidikan perdamaian itu sendiri dapat digunakan dalam program deradikalisasi sebagai salah satu kurikulum pengajarannya. Dalam tulisan ini, penulis akan melihat bagaimana pendidikan perdamaian dapat diintegrasikan sebagai salah satu bagian dari program deradikalisasi, khususnya kepada para napi teroris yang sudah berada dalam lembaga pemasyarakatan, dan juga bagaimana para napi teroris tersebut bisa diberdayakan sebagai pendidik pendidikan perdamaian di masyarakat setelah bebas.

Kata Kunci: pendidikan perdamaian, deradikalisasi, terorisme, kekerasan, pendidik pendidikan perdamaian

Abstract - Peace education is a term that is not very well known. The term is certainly less popular than the term terrorism that of course everyone is quite familiar with it. Peace education seeks to develop the knowledge, competencies, attitudes, and values that aims to change attitudes, traits, and the mindset of people creates or increases violence. Deradicalization program aims to change the mindset of terrorists so that they will no longer deviate from the right teachings and eliminate the culture of violence that they was once followed. Because peace education is a means used to develop a culture of peace, then peace education itself can be used in deradicalization programs as one of the teaching curriculum. In this paper, we will see how peace education can be integrated as a part of a deradicalization program, particularly for terrorist prisoners who had been in the penitentiary, and also how the terrorist prisoners can be empowered as educators of peace education in the community after release.

¹ Pengamat Militer dan Pertahanan dari Universitas Paramadina. Alumni Program Studi Peace and Conflict Resolution Cohort I Universitas Pertahanan Indonesia. Saat ini aktif mengajar di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Universitas Bung Karno, Universitas 17 Agustus 1945, dan Universitas Satya Negara Indonesia.

² Saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Paramadina, mengambil Program Studi Hubungan Internasional. Aktif di Universitas Paramadina Model of United Nations (MUN) sebagai Student Ambassador.

Keywords: *peace education, deradicalization, terrorism, violence, educators of peace education*

Pendahuluan

Terorisme menjadi sebuah istilah penting di awal abad ke-21 ini, terutama sejak peristiwa 9/11 tahun 2001 di Amerika Serikat. Terorisme menurut T.P. Thornton, adalah penciptaan ketakutan yang disengaja, biasanya melalui penggunaan tindakan-tindakan simbolis berupa kekerasan, untuk mempengaruhi sikap politik dari kelompok-kelompok tertentu (*the deliberate creation of fear, usually through the use (or threat of use) of symbolic acts of violence, to influence the political behaviour of a target group*). Sedangkan menurut Bowyer Bell, terorisme adalah senjata kaum lemah, tetapi merupakan senjata yang sangat ampuh.³

Terorisme juga merupakan suatu tindakan yang didasari sistem nilai dan cara pandang dunia, sehingga untuk memahaminya diperlukan suatu kerangka dan metodologi pemikiran yang biasa digunakan dalam tradisi filsafat. Sekedar contoh, seringkali mereka yang dilabeli teroris justru menganggap bahwa aksinya sebagai tindakan suci dan berguna bagi kemanusiaan. Logika, bahasa, dan argumen yang mereka bangun itu perlu dipahami untuk mencari akar permasalahan. Atas dasar itulah, terorisme sendiri adalah suatu fenomena sosial yang sulit dimengerti.⁴ Sulitnya memahami kerangka dan cara berpikir para teroris membuat upaya penangkalannya pun terhambat. Badan Nasional penanggulangan Terorisme (BNPT) muncul dengan program deradikalisasi untuk mencegah berkembangnya paham terorisme di Indonesia.

Pendidikan perdamaian sendiri adalah sebuah terminologi yang belum terlalu dikenal. Istilah ini tentunya kalah pamor dibanding istilah terorisme yang tentu semua orang sudah cukup familiar dengannya. Akan tetapi, pendidikan perdamaian adalah sebuah konsep pendidikan yang dapat digunakan untuk mempromosikan budaya perdamaian. Pendidikan perdamaian berupaya mengembangkan pengetahuan,

³ Rod Thornton, *Asymmetric Warfare: Threat and Response in the 21st Century*, (UK: Polity Press, 2007), hlm. 56-57.

⁴ Abdullah Mahmud Hendropriyono, *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 1-2.

kompetensi, sikap-sikap, dan nilai-nilai yang bertujuan untuk mengubah sikap, sifat, dan pola pikir seseorang yang menciptakan atau meningkatkan kekerasan.⁵

Program deradikalisasi bertujuan untuk mengubah pola pikir teroris untuk tidak lagi menyimpang dari ajaran yang benar dan menghilangkan budaya kekerasan yang dianutnya. Karena pendidikan perdamaian adalah sebuah cara yang digunakan untuk mengembangkan budaya damai, maka pendidikan perdamaian itu sendiri dapat digunakan dalam program deradikalisasi sebagai salah satu kurikulum pengajarannya. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas apa yang dimaksud dengan program deradikalisasi, kemudian dilanjutkan dengan apa yang dimaksud dengan pendidikan perdamaian. Setelah itu, penulis akan melihat bagaimana pendidikan perdamaian dapat diintegrasikan sebagai salah satu bagian dari program deradikalisasi, khususnya kepada para napi teroris yang sudah berada dalam lembaga pemasyarakatan, dan juga bagaimana para napi teroris tersebut bisa diberdayakan sebagai pendidik pendidikan perdamaian di masyarakat setelah bebas.

Mengenal Deradikalisasi

Pada bagian awal ini, penulis akan mengutip beberapa diskursus terkait deradikalisasi yang umumnya berasal dari tulisan Agus Surya Bakti. Untuk memberantas terorisme di Indonesia, cara-cara militeristik terbukti kurang ampuh. Ternyata, peluru mampu menembus badan, tetapi tidak mampu menembus hati dan pikiran kelompok radikal teroris. Lalu, dipilihlah pendekatan yang disebut deradikalisasi. Munculnya deradikalisasi karena tumbuh suburnya paham radikal yang mengatasnamakan agama, yang kemudian naik kelas menjadi teroris serta menghancurkan kehidupan, memporakporandakan tatanan dan tuntunan beragama, serta bermasyarakat dan bernegara.⁶

Selain itu, deradikalisasi juga merupakan upaya mengajak masyarakat yang radikal, terutama narapidana teroris, mantan napi teroris, keluarga, dan jaringannya agar kembali ke jalan yang benar berdasarkan aturan agama, moral, dan etika yang senapas dengan

⁵ Loreta Navaro-Castro dan Jasmin Nario-Galace, *Peace Education: A Pathway to a Culture of Peace*, (Quezon City: Center for Peace Education, 2010), hlm. 27.

⁶ Agus Surya Bakti (a), *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*, (Jakarta: Daulat Press, 2014), hlm. 173.

esensi ajaran semua agama yang sangat menghargai keragaman dan perbedaan. Program deradikalisasi ingin mengajarkan kepada para mantan teroris untuk kembali menjadi warga negara Indonesia yang benar sesuai Pancasila dan UUD 1945 dalam wilayah NKRI, di bawah prinsip bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam persatuan yang dirangkum dalam Bhinneka Tunggal Ika.⁷

Deradikalisasi adalah bagian dari strategi kontra terorisme. Deradikalisasi dipahami sebagai bagian dari sebuah cara merubah ideologi kelompok teroris secara drastis. Perubahan drastis ini berwujud bukan hanya individu yang terbebas dari tindakan kekerasan, namun juga melepaskan diri dari kelompok radikal yang menaunginya selama ini. Program deradikalisasi lebih banyak berbentuk *soft approach*, baik kepada masyarakat secara luas, kelompok tertentu, maupun kepada individu-individu yang masuk dalam jaringan kelompok radikal.⁸

Menurut Petrus Golose, deradikalisasi adalah segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal atau pro-kekerasan. Dalam hal ini, mereka termasuk narapidana, mantan narapidana, individu militan radikal yang pernah terlibat, keluarganya, simpatisannya, dan masyarakat umum. Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, reedukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun simpatisannya. Program deradikalisasi harus bisa melepaskan ideologi-ideologi dalam diri teroris atau menghentikan penyebaran ideologi itu. Sehingga dalam pelaksanaan deradikalisasi perlu dilakukan bersamaan dengan deideologi. Deideologi ini kunci utama dalam penyadaran, serta reorientasi ideologi teroris untuk kembali ke ajaran yang benar.⁹

Desain program deradikalisasi telah dirancang untuk memiliki empat komponen, yaitu reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi. Reedukasi adalah penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang pada radikal sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut. Bagi para terpidana kasus terorisme,

⁷ *Ibid*, hlm. 173-174.

⁸ *Ibid*, hlm. 174.

⁹ *Ibid*, hlm. 174-175.

reedukasi dilakukan dengan memberikan pencerahan terkait doktrin-doktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan, sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad.¹⁰

Rehabilitasi memiliki dua makna, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian adalah melatih dan membina para mantan napi dalam mempersiapkan ketrampilan dan keahlian, agar ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan nanti mereka sudah memiliki keahlian. Sedangkan, pembinaan kepribadian adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara berdialog kepada para napi teroris agar *mind set* mereka bisa diluruskan, serta memiliki pemahaman yang komprehensif dan dapat menerima pihak yang berbeda dari mereka. Kemudian, untuk memudahkan para napi teroris kembali kemasyarakat, perlu dilakukan upaya untuk membimbing mereka dalam bersosialisasi dan menyatu kembali dengan lingkungan masyarakat. Ini yang disebut dengan resosialisasi dan reintegrasi.¹¹

BNPT sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab menyelenggarakan program deradikalisasi berpandangan bahwa program ini tidaklah bertujuan menjauhkan Islam dari pemeluknya, atau bahkan mengkriminalisasi Islam. Akan tetapi, program deradikalisasi justru mendekatkan umat Islam pada pemahaman ke-Islaman yang moderat, humanis, dan senantiasa menjaga kedamaian dalam lingkungan kehidupan yang majemuk (*ummatan wasathan*).¹²

Dalam melakukan program deradikalisasi BNPT banyak belajar dari negara-negara lain yang mengalami kasus serupa, yaitu ancaman terorisme. Salah duanya adalah Belanda dan Inggris. Di Belanda, dalam menghadapi radikalisme yang muncul dari kalangan kaum imigran, terutama dari Afrika dan Timur Tengah, pemerintah negara tersebut menggandeng para pemikir dan perguruan tinggi guna menghadapi radikalisme agama. Pemerintah Belanda juga terus melakukan pemantauan dan supervisi atas lembaga-lembaga agama yang dianggap rentan menumbuhkan ide-ide radikal. Sedangkan, di Inggris program deradikalisasi dilakukan dalam bentuk pembicaraan pribadi dengan tahanan di penjara. Pembicaraan itu dilakukan atas dasar sukarela dan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 181-182.

¹¹ *Ibid*, hlm. 182.

¹² *Ibid*, hlm. 177.

bisa dihentikan setiap saat. Walaupun belum terlihat jelas dampaknya, yang pasti masyarakat dan pemerintah Inggris terus bekerja sama agar paham radikalisme tidak menyebar lebih jauh.¹³

Program deradikalisasi sendiri memiliki multi tujuan bagi penanggulangan masalah terorisme secara keseluruhan, yaitu:

1. Melakukan *counter terrorism*.
2. Mencegah proses radikalisme.
3. Mencegah provokasi, penyebaran kebencian, dan permusuhan antarumat beragama.
4. Mencegah masyarakat dari indoktrinasi.
5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham teror.
6. Memperkaya khazanah atas perbandingan paham.

Pendidikan Perdamaian

Menurut R.D. Laing, pendidikan perdamaian adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk menanggapi masalah-masalah yang terkait konflik dan kekerasan, yang berskala global dan nasional menuju ke skala yang lebih kecil, yaitu lokal dan personal. Sedangkan menurut Fran Schmidt and Alice Friedman, pendidikan perdamaian adalah proses pembentukan ketrampilan (*skill*). Pendidikan perdamaian memperkuat anak-anak untuk menemukan cara-cara kreatif dan non-destruktif untuk menyelesaikan sebuah konflik dan hidup dalam harmoni dengan diri mereka sendiri, orang lain, maupun di dunia ini. Mengembangkan budaya damai adalah tugas setiap manusia dan tantangan bagi setiap keluarga.¹⁴

Pendidikan perdamaian juga mencari cara-cara untuk menciptakan masa depan yang adil dan berkelanjutan (*sustainable*). Pendidikan perdamaian juga lebih efektif dan bermanfaat bagi para pelaku tindakan terorisme yang sekarang sedang menjalani program deradikalisasi karena akan melibatkan partisipasi dari para napi teroris untuk

¹³ *Ibid*, hlm. 180.

¹⁴ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, *Peace Education: Framework for Teacher Education*, (New Delhi: UNESCO, 2005), hlm. 9.

mengekspresikan pemikiran mereka dan bekerja sama antar sesama mereka untuk menghilangkan kekerasan dalam kehidupan individu, komunitas, maupun masyarakat.

Pendidikan perdamaian akan mengajak para pembelajarnya untuk paham dan mengerti akar dan juga cabang dari sebuah konflik, sekaligus memahami alternatif-alternatif yang dapat timbul. Kemudian, melalui refleksi, diskusi, dan penggunaan perspektif yang beragam agar para pembelajarnya dapat melihat dari beragam sudut pandang. Selain itu, pendidikan perdamaian juga mengajarkan kita untuk seolah-olah berada di pihak atau sisi lain untuk mengembangkan empati bagi para korban kekerasan atau mereka yang mempunyai perspektif atau sudut pandang berbeda dengan kita. Pendidikan perdamaian mendatangkan cara berpikir alternatif yang adil dan membangun, di mana pembelajar di dorong untuk mengembangkan upaya-upaya resolusi dan transformasi konflik melalui cara-cara non-kekerasan.¹⁵

Hal ini berarti bahwa proses pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan perdamaian bersifat holistik dan berusaha untuk menyentuh dimensi kognitif, afektif, dan aktif dari pembelajarnya. Karena itu, pembelajaran dari resolusi konflik melalui cara-cara non-kekerasan adalah aspek penting dari pendidikan perdamaian. Pendidikan perdamaian dapat mentransformasikan *mindset* seseorang untuk melihat bahwa ada alternatif lain untuk menyelesaikan sebuah perbedaan di luar cara-cara kekerasan. Mereka dapat belajar cara-cara menyelesaikan masalah melalui metode *collaborative problem solving* yang dilakukan melalui mediasi atau negosiasi. Metode ini dapat meningkatkan kualitas hubungan antar-manusia sehingga dimungkinkan terciptanya solusi yang konstruktif. Ini menjadi alasan penulis bahwa pendidikan perdamaian juga bisa diintegrasikan ke dalam program deradikalisasi, karena pada prinsipnya program tersebut juga akan mengubah *mindset* dari para napi teroris. Mengapa pendidikan perdamaian penting diajarkan sebagai bagian dari program deradikalisasi, berikut adalah penjelasannya.

Integrasi Pendidikan Perdamaian ke dalam Program Deradikalisasi

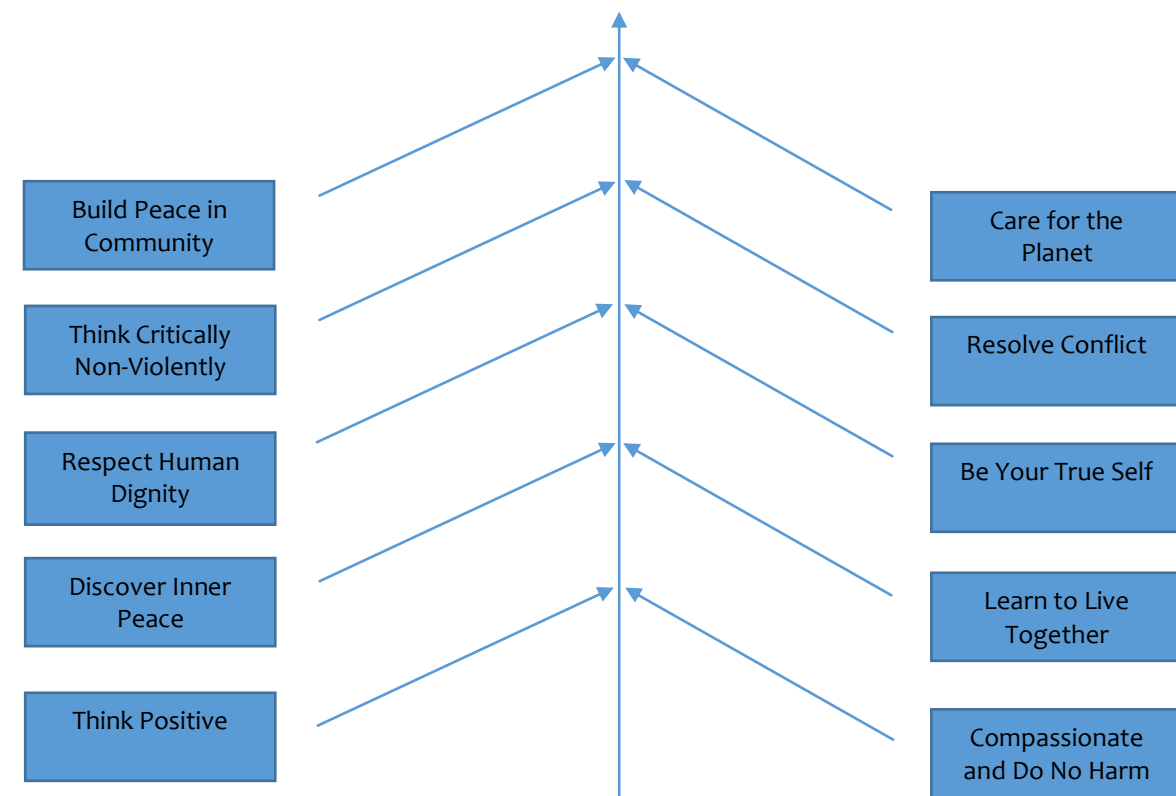
Dalam program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT, faktor lingkungan adalah faktor yang teramat penting agar para mantan teroris menghilangkan pemahaman-pemahaman

¹⁵ Castro dan Galace, *op cit*, hlm. 28.

radikalnya. Dalam pendidikan perdamaian, lingkungan juga memegang peranan yang tak kalah penting. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang bebas kekerasan (*free violence*). Banyak institusi pendidikan tetap menerapkan kekerasan dalam metode pembelajarannya dalam bentuk indoktrinasi nilai-nilai, pendapat, aspirasi, sampai prasangka, apalagi jika kita bicara dalam konteks tahanan. Bagaimana pun para napi teroris ini tetaplah seorang dengan status tahanan. Untuk itu, dalam program deradikalisasi tidak boleh ada kekerasan sedikit pun.

Selanjutnya, kurikulum pendidikan perdamaian tidak boleh dipisahkan dari program utama. Kurikulum ini dapat memberikan nuansa dan perspektif baru yang dapat dieksplorasi sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, ketika program deradikalisasi bicara tentang menghilangkan unsur-unsur radikal dan kekerasan maka salah satu kajian dari pendidikan perdamaian, yaitu *thematic model of peace* yang dikembangkan UNESCO bisa digunakan. Selain itu, program deradikalisasi pasti bicara bagaimana mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama.¹⁶ Sebuah hal yang juga dibahas dalam *thematic model of peace* di atas. Berikut adalah gambar dan penjelasannya:

Gambar 1. *Thematic Model of Peace*



¹⁶ Agus Surya Bakti (b), *Merintis Jalan Mencegah Terorisme (Sebuah Bunga Rampai)*, (Jakarta: Semarak Lautan Warna, 2014), hlm. 2.

Sumber: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation United Nations Educational, *Peace Education: Framework for Teacher Education*, (New Delhi: UNESCO, 2005), hlm.18.

Dalam *thematic model of peace*, toleransi erat kaitannya dengan pengertian “*Learning to Live Together*” dan “*Respect Human Dignity*”. Membangun kepercayaan, mengembangkan sikap saling menolong, berbagi, serta penghormatan terhadap hak asasi orang lain merupakan beberapa konten dalam kurikulum pendidikan perdamaian yang bisa diintegrasikan ke dalam program deradikalisasi. Salah satu prinsip deradikalisasi juga adalah Hak Asasi Manusia, mengingat HAM bersifat universal, kodrati, tidak dapat dicabut, dan harus dilindungi oleh negara.¹⁷

Pentingnya toleransi dalam program deradikalisasi terlihat dari tulisan Agus Surya Bakti. Ia berpendapat, sikap toleran dapat ditumbuhkembangkan melalui pembelajaran dan pembiasaan (*learning habits*). Seperti yang sudah penulis sebutkan, proses pembelajaran ini akan berjalan lebih cepat dan produktif bila didukung faktor lingkungan, dalam hal ini bisa keluarga atau pergaulan. Agus mencontohkan, efektivitas kepemimpinan Nabi Muhammad SAW telah menciptakan kehidupan yang sebelumnya penuh dengan kekerasan menjadi kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Ini merupakan pelajaran penting bagi umat Islam dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Keteladanan yang dicerminkan Nabi Muhammad SAW juga telah menginspirasi para pendiri bangsa ketika membuat dasar negara, dengan fondasi Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertamanya. Untuk itu, semangat toleransi dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan modal bagi bangsa Indonesia untuk terbebas, maupun mencegah segala bentuk kekerasan dan terorisme.¹⁸

Selain toleransi, yang juga diajarkan dalam program deradikalisasi adalah peran masyarakat dalam pencegahan terorisme. Menurut Agus Surya Bakti, peran masyarakat di sini juga bisa diartikan sebagai pelibatan kearifan lokal (*local wisdom*) untuk menjadi benteng yang kokoh menangkal radikalisme teroris. Sebagai negara yang majemuk dengan ratusan suku bangsa dan budaya, sejatinya kita punya banyak potensi untuk

¹⁷ Bakti (b), *op.cit*, hlm. 184.

¹⁸ Bakti (a), *op.cit*, hlm. 8-9.

mencegah terorisme, salah satunya adalah dengan menggunakan kearifan lokal yang terdapat dalam masing-masing budaya yang ada di masyarakat kita ini. Salah satu upaya BNPT terkait ini adalah dengan membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), sejauh ini sudah terdapat di 20 provinsi.¹⁹

Dalam konteks kearifan lokal, adalah para tokoh di tingkat lokal yang paling memahami kondisi daerah masing-masing. Karena itu, keterlibatan para tokoh adat, agama, pemuda, dan perempuan dalam FKPT dapat memperkaya strategi dan metode yang tepat untuk melakukan pencegahan terorisme di masyarakat. Tidak ada sesuatu yang instan dalam pemberantasan terorisme, untuk itu alangkah baiknya jika dimulai dari tingkat yang paling bawah.

Untuk program deradikalisasi para napi teroris, unsur-unsur dalam FKPT dapat juga dilibatkan. Seperti yang penulis sebutkan di paragraf sebelumnya, tokoh adat juga dilibatkan dalam forum ini. Pendidikan perdamaian juga lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat jika diintegrasikan dengan konteks sosial dan budaya lokal, yaitu kearifan lokal tadi. Penulis berpendapat, kearifan lokal dapat menjadi salah satu kurikulum yang diajarkan dalam program deradikalisasi, dengan tambahan nuansa pendidikan perdamaian di sana. Hal ini karena kurikulum pendidikan perdamaian harus diperkaya oleh nilai-nilai kultural dan spiritual, bersamaan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal.²⁰

Sebagai contoh, dalam masyarakat Bali sebagai satu kesatuan geografis, suku, ras, agama memiliki nilai kearifan lokal yang telah teruji dan terbukti daya jelajah sosialnya dalam mengatasi berbagai problematika kehidupan sosial. Nilai kearifan lokal yang berkembang dan diyakini sebagai perekat sosial yang kerap menjadi acuan dalam menata hubungan dan kerukunan antar sesama umat beragama di Provinsi Bali, diantaranya: Nilai kearifan *Tri Hita Karana*; suatu nilai kosmopolit tentang harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan (*sutata parahyangan*), hubungan manusia dengan sesama umat manusia (*sutata pawongan*) dan harmonisasi hubungan manusia dengan alam lingkungannya (*sutata palemahan*). Nilai kearifan lokal ini telah mampu menjaga dan menata pola

¹⁹ Bakti (b), *op.cit*, hlm. 245.

²⁰ Casto-Galace, *op.cit*, hlm. 58.

hubungan sosial masyarakat yang berjalan sangat dinamis dan tidak terjadi konflik antar suku.²¹

Nilai kearifan lokal *tri kaya parisuda*, sebagai wujud keseimbangan dalam membangun karakter dan jati diri insani, dengan menyatukan unsur pikiran, perkataan dan perbuatan. Tertanamnya nilai kearifan ini telah melahirkan insan yang berkarakter, memiliki konsistensi dan akuntabilitas dalam menjalankan kewajiban sosial. Nilai kearifan lokal *Tatwam Asi*, “kamu adalah aku dan aku adalah kamu”, nilai ini memberikan fibrasi bagi sikap dan perilaku mengakui eksistensi seraya menghormati orang lain sebagaimana menghormati diri sendiri. Nilai ini menjadi dasar yang bijaksana dalam membangun peradaban demokrasi modern yang saat ini sedang digalakkan.²²

Nilai *Salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya*, suatu nilai sosial tentang perlunya kebersamaan dan kerjasama yang setara antara satu dengan yang lainnya sebagai satu kesatuan sosial yang saling menghargai dan menghormati. Nilai *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai sikap sosial yang menyadari akan kebersamaan ditengah perbedaan, dan perbedaan dalam kebersamaan. Semangat ini sangat penting untuk diaktualisasikan dalam tatanan kehidupan sosial yang multikultural. Nilai kearifan lokal *menyama braya*, mengandung makna persamaan dan persaudaraan dan pengakuan sosial bahwa kita adalah bersaudara. Sebagai satu kesatuan sosial persaudaraan maka sikap dan perilaku dalam memandang orang lain sebagai saudara yang patut diajak bersama dalam suka dan duka. Sederetan nilai-nilai kearifan lokal tersebut akan bermakna bagi kehidupan sosial apabila dapat menjadi rujukan dan bahan acuan dalam menjaga dan menciptakan relasi sosial yang harmonis. Sistem pengetahuan lokal ini seharusnya dapat dipahami sebagai sistem pengetahuan yang dinamis dan berkembang terus secara kontekstual sejalan dengan tuntutan kebutuhan manusia yang semakin heterogen dan kompleks.²³

Contoh lainnya, adalah di Sulawesi Tengah, tepatnya di Poso. Sebagai salah satu daerah yang sempat dilanda konflik yang sangat besar, peran kearifan lokal sangatlah penting untuk meredam konflik tersebut. Masyarakat Poso mempunyai konsep mirip

²¹ A.A.G. Oka Wisnumurti, “Mengelola Nilai Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama”, <http://www.yayankorpribali.org/artikel-dan-berita/59-mengelola-nilai-kearifan-lokal-dalam-mewujudkan-kerukunan-umat-beragama.html>, diunduh pada 18 Maret 2013.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

dengan istilah “perdamaian”, yaitu *sintuwu maroso*. Istilah ini adalah salah satu sistem nilai kebudayaan yang dianut oleh masyarakat Poso. *Sintuwu Maroso* dalam perkembangannya dimaknai sebagai suatu pengikat hubungan tali persaudaraan antara sesama. Sistem tersebut tetap dipertahankan secara turun temurun dimanapun penganutnya berada, walaupun ditanah rantau sekalipun. Hingga saat inipun falsafah tersebut dilestarikan sebagai sebuah kearifan lokal masyarakat di Poso.

Konsep-konsep budaya lokal yang mengajarkan perdamaian ini harus dimasukkan dalam program deradikalisasi dan diajarkan kepada para napi teroris. Konsep ini, menurut pandangan penulis, sangat berguna dalam proses rehabilitasi dan reedukasi mereka. Pengajaran tentang materi ini akan membuat mereka paham tentang nilai-nilai toleransi, tenggang rasa, *tepo seliro*, sampai hak asasi manusia, sekaligus mempersiapkan mereka untuk berperan aktif di masyarakat nantinya sebagai pengajar-pengajar pendidikan perdamaian (akan dijelaskan di subbab berikutnya).

Mempromosikan budaya anti-kekerasan menjadi salah satu materi utama pendidikan perdamaian yang diusulkan oleh Loreta Castro dan Jasmin Galace dalam bukunya.²⁴ Ketika menghadapi kekerasan langsung atau kekerasan struktural, manusia biasanya dihadapkan pada tiga pilihan: tidak melakukan apa-apa, menanggapi dengan aksi kekerasan juga, dan terakhir menanggapi dengan aksi non-kekerasan.

Tidak melakukan apa-apa terhadap kekerasan atau penindasan hanya akan membuat sistem yang menindas dan melakukan kekerasan tadi terus berulang. Ketidakmampuan bertindak biasanya disebabkan oleh ketakutan, ketidakberdayaan, dan ketidakacuhan. Jika menanggapi dengan kekerasan juga, tentunya akan membuat permusuhan dan pembunuhan terus terjadi. Mereka yang menanggapi dengan kekerasan beralasan bahwa mereka dimotivasi oleh keinginan untuk mencari keadilan atau untuk mempertahankan harga diri seseorang. Akan tetapi, kekerasan meninggalkan kebencian dan kepahitan kepada para korban, yang ujungnya akan memicu perbuatan yang sama kepada orang lain (balas dendam). Di sisi lain, menanggapi dengan aksi non-kekerasan membuat sebuah situasi yang akan membebaskan para korban dari kebisuan dan ketidakberdayaannya, sehingga menjadi lebih berpengertian dan solider. Mereka akan

²⁴ Casto-Galace, *op.cit*, hlm. 95-108.

memaksa pihak yang senang melakukan kekerasan untuk akhirnya membuka pintu negosiasi.²⁵

Bicara kekerasan, tindakan terorisme selalu bermuara pada hal tersebut. Bom, penembakan, sampai teror melalui media menjadi contoh kekerasan fisik, maupun psikis. Menurut Martha Crenshaw, kehidupan terorisme dapat memberikan pemenuhan kebutuhan, seperti kebutuhan untuk melakukan kekerasan. Kebencian, muak, dan balas dendam adalah istilah-istilah yang paling tepat menggambarkan nuansa perasaan dan motivasi para teroris.²⁶ Riset Martha Crenshaw ini menunjukkan bahwa kekerasan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas terorisme sehari-hari.

Dalam program deradikalisasi, nuansa kekerasan ini harus dihilangkan agar seorang napi teroris dapat kembali ke jalan yang benar. Castro-Galace menuliskan cukup banyak metode-metode non-kekerasan yang dapat digunakan untuk menghilangkan unsur kekerasan yang masih melingkupi para napi teroris. Untuk itu, langkah-langkah berikut adalah beberapa konten dari kurikulum non-kekerasan (dari perpektif pengajar/guru) yang diajarkan di dalam pendidikan perdamaian, yang penulis rasa dapat diintegrasikan ke dalam program deradikalisasi:²⁷

- Pengajar pendidikan perdamaian harus menunjukkan keteladanan yang baik. Tidak boleh bersikap keras kepada peserta didiknya, termasuk juga cara berucap, sikap, dan ekspresi. Hal ini penting karena yang dihadapi adalah napi teroris, untuk itu perlu dipraktekkan sikap-sikap yang sangat berlawanan dengan kebiasaan mereka sehari-hari, yaitu kekerasan.
- Tentukan bersama peserta didik beberapa aturan agar kelas dapat menjadi damai. Dengan melibatkan mereka dalam perumusan aturan tersebut, mereka akan menjadi lebih terikat terhadapnya.
- Lakukan kegiatan atau permainan yang lebih kooperatif daripada kompetitif. Tekankan pada kebahagiaan dari melakukan kegiatannya bersama-sama dibandingkan penghargaan terhadap hasilnya.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 95-96.

²⁶ Martha Crenshaw, "Pertanyaan yang Harus Dijawab, Riset yang Harus Dikerjakan, Pengetahuan yang Harus Diterapkan", dalam Walter Reich (ed), *Origins of Terrorism: Tinjauan Psikologi, Ideologi, Teologi, dan Sikap mental*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 350.

²⁷ Casto-Galace, *op.cit*, hlm. 104-106.

- Lebih baik gunakan teknik-teknik damai untuk meresolusi konflik, daripada tindakan-tindakan yang sifatnya hukuman.
- Semangati, kuatkan, dan beri penghargaan apabila mereka melakukan hal-hal yang baik.
- Ajarkan teknik-teknik pengelolaan kemarahan, seperti ambil nafas dalam-dalam, hitung sampai sepuluh, atau ucapkan doa apabila merasa kesal atau marah.
- Ceritakan kisah-kisah tentang kerjasama.
- Ajarkan mereka mengenai cinta tanah air dan cinta kasih kepada seluruh umat manusia. Tekankan pada perasaan bahwa kita semua adalah sesama umat manusia.
- Ajarkan juga tentang pahlawan-pahlawan kedamaian, jangan hanya pahlawan perang saja. Tokoh-tokoh, seperti Aung San Suu Kyi, Ninoy Aquino, Desmond Tutu, Rosa Parks, Nelson Mandela, dan lain-lain layak dikisahkan.
- Putar film-film yang bercerita tentang perjuangan tokoh-tokoh yang anti-kekerasan, contohnya seperti pahlawan-pahlawan perdamaian di atas tadi. Ajak mereka untuk merefleksikan ajaran atau pemikiran tokoh-tokoh tersebut tentang perdamaian.
- Minta mereka untuk melakukan riset tentang ajaran non-kekerasan dari agama-agama besar di dunia. Setelah itu, buat poster yang berisi ajaran mana yang mereka paling sukai
- Ajak mereka untuk membuat materi-materi kampanye, seperti spanduk, slogan, poster, flyer, karikatur, puisi, lagu, petisi, atau apa pun juga, yang isinya tentang pemikiran mereka terkait kampanye non-kekerasan.
- Buat surat pembaca tentang isu-isu perdamaian, lalu kirimkan ke media-media nasional, lokal, atau *online*.
- Lakukan analisa kasus dan permainan peran (*role playing*). Hadapkan mereka pada situasi kekerasan, setelah itu minta mereka meresponi situasi tersebut, dan merancang solusinya menggunakan strategi non-kekerasan.

Untuk menutup subbab ini, penulis menyarankan agar kurikulum pendidikan perdamaian diintegrasikan secara suportif ke dalam program deradikalisasi. Selain contoh-contoh yang penulis sudah utarakan di atas, penulis juga ingin mengusulkan beberapa kurikulum berikut, seperti pembahasan mengenai *Tolerance and Peace, Education for Mutual Understanding, Conflict Resolution Education, Peace Education for Teachers, Local Wisdom and anti-Violence*, dan lain-lain. Selain itu, kegiatan dalam program deradikalisasi dapat diisi dengan diskusi, bermain drama, menonton film, analisis film, menerima kunjungan dan diskusi dengan tokoh agama Islam, Kristen, Budha, dan Hindu untuk mengenal dan mengetahui agama, membuat film pendek, serta menceritakan persoalan yang dialami, seperti masalah ekonomi, sosial, dan lain-lain. Tentunya materi yang ada dalam seluruh kegiatan ini adalah terkait perdamaian. Pendidikan perdamaian bisa dimasukkan ke dalam kegiatan-kegiatan seperti tadi, contohnya menonton film yang terkait upaya-upaya perdamaian, atau juga berdiskusi dengan tokoh agama lain, dimana hal tersebut dapat mengajarkan sikap toleransi beragama dan anti-kekerasan.

Mantan Napi Teroris sebagai Pendidik Pendidikan Perdamaian

Pendidikan perdamaian juga akan efektif diintegrasikan ke dalam program deradikalisasi jika keluaran hasilnya pun dapat bermanfaat. Setelah melihat bagaimana kurikulum pendidikan perdamaian diintegrasikan ke dalam program deradikalisasi pada bab sebelumnya, kali ini penulis akan mengusulkan bagaimana memanfaatkan para napi teroris setelah mereka keluar dari tahanan. Tentunya setelah mendapat kurikulum pendidikan perdamaian selama program deradikalisasi, keluaran yang dihasilkan haruslah terus dirasa kegunaannya. Program deradikalisasi tidak boleh hanya selesai ketika si napi keluar dari tahanan, melainkan harus terus menerus dibina secara kontinu.

Pendidikan perdamaian akan membantu program deradikalisasi, khususnya jika para pelaku tersebut ketika sudah menjalani masa tahanannya, sehingga dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat umum. Nuansa pendidikan perdamaian dalam program deradikalisasi akan membantu para mantan pelaku yang sudah bebas untuk membangun apa yang disebut *Education for Sustainable Development*.

Apa maksudnya *Education for Sustainable Development* dan apa hubungannya dengan para mantan pelaku teroris? Penulis disini ingin menciptakan sebuah kondisi di mana setelah pelaku bebas dan kembali di masyarakat, pelaku tidak akan mengalami disorientasi sosial karena dijauhi masyarakat atau tidak bisa menemukan pekerjaan, dikarenakan masa lalunya sebagai mantan narapidana teroris. Sang mantan pelaku akan menjadi pendidik-pendidik gerakan pendidikan bagi perkembangan berkelanjutan. Apa ini artinya? Artinya adalah mereka akan dibekali kemampuan-kemampuan pedagogi, terutama untuk menjadi seorang pendidik pendidikan perdamaian.

Dalam kurikulum pendidikan perdamaian yang sudah dimasukkan ke dalam program deradikalisasi, seperti yang sudah penulis jelaskan di bagian awal, salah satu kurikulumnya adalah bagaimana mempersiapkan para mantan pelaku ini sebagai seorang tenaga pendidik pendidikan perdamaian di masyarakat nantinya. Mengapa hal ini penting? Menurut penulis, setiap ada mantan tahanan terorisme yang bebas dan kembali ke masyarakat, mereka mengalami disorientasi sosial. Dengan stigma sebagai mantan teroris, sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan untuk sekedar mendapatkan pengakuan dari sesama anggota masyarakat.

Atas dasar inilah, penulis merasa tugas pemerintah tidak selesai hanya sampai program deradikalisasi usai dan mantan tahanan terorisme dibebaskan. Negara mempunyai kewajiban membina dan mengurus mereka agar bisa kembali berintegrasi secara positif di masyarakat. Jika tidak, sang mantan tahanan ini bisa saja kembali ke “profesi” lamanya sebagai teroris. Ketika tidak ada pengakuan dan penerimaan kembali dari lingkungan masyarakat, para mantan tahanan ini sangat rentan untuk kembali ke kehidupan lamanya. Kita masih ingat salah satu pelaku bom Thamrin yang ternyata adalah mantan tahanan terorisme yang sudah dibebaskan. Karena tidak mendapatkan pengakuan dari masyarakat, termasuk mendapat pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, kecenderungan mereka untuk kembali menebar teror di masyarakat sangatlah besar. Hal ini pun sesuai dengan salah dua dari desain deradikalisasi, yaitu resosialisasi dan reintegrasi.

Penerimaan di masyarakat saja tidak cukup bagi mereka. Mereka harus diberdayakan seperti halnya anggota masyarakat lain. Singkat kata, mereka harus “bekerja”. Untuk itu, penulis beranggapan bahwa program deradikalisasi harus membuat

kurikulum yang berguna bagi pengembangan *soft* maupun *hard skill* mereka, yang dapat mereka gunakan jika sudah bebas nanti. Disini pengembangan kurikulum pendidikan perdamaian dalam program deradikalisasi menjadi penting. Seperti yang penulis sudah sebutkan sebelumnya, mereka akan diajarkan bagaimana caranya untuk menjadi pendidik-pendidik pendidikan perdamaian di masyarakat yang berguna bagi *Education for Sustainable Development*.

Sustainable Development dalam hal ini adalah bagaimana masyarakat harus mampu terus mengembangkan dirinya secara konsisten ke arah perubahan-perubahan yang positif. Salah satunya adalah dengan mereduksi konflik yang sering terjadi di masyarakat itu sendiri, seperti konflik sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Penulis selama ini belum melihat upaya pemerintah untuk mengembangkan budaya damai di masyarakat. Sejauh ini, yang terlihat hanya kampanye-kampanye melalui iklan atau spanduk di jalan-jalan yang berisi ajakan untuk berdamai atau untuk menjauhi konflik.

Salah satu inti program pendidikan perdamaian adalah edukasi langsung kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya damai di antara mereka. Sayangnya, pendidikan perdamaian belum masuk menjadi kurikulum resmi yang dimasukkan sebagai salah satu bahan ajar di tingkatan pendidikan mana pun di Indonesia. Di beberapa negara Eropa, seperti Finlandia dan Norwegia, termasuk juga di Amerika Serikat, pendidikan perdamaian sudah diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan nasional, dan diajarkan mulai tingkat sekolah dasar. Mereka menyadari pentingnya budaya damai diajarkan sejak dini agar anak-anak mereka tidak memiliki tendensi kekerasan dan sejak dini mampu mengembangkan karakter cinta damai.

Sekarang adalah bagian yang menarik. Apakah mantan tahanan teroris dapat berubah 180 derajat dari penyebar kebencian dan kematian, menjadi pendidik tentang kedamaian dan cinta kasih di masyarakat? Tentu bisa, jawabannya ada di seberapa efektif atau tidakkah kurikulum pendidikan perdamaian yang akan diintegrasikan ke dalam program deradikalisasi. Di akhir pendidikan tentang kurikulum pendidikan perdamaian, setiap peserta akan diajarkan untuk bagaimana mengaplikasikan pendidikan yang sudah diajarkan ke dalam lingkungan masyarakatnya nanti. Mereka akan belajar ilmu tentang mengajar sehingga akan menjadi efektif nanti ketika mereka sudah bebas dan menjadi pendidik pendidikan perdamaian di masyarakat.

Ketika para mantan tahanan sudah bebas, pemerintah dengan cepat menginstruksikan Kementerian Sosial atau kementerian/lembaga terkait lainnya, untuk mempekerjakan mereka sebagai tenaga-tenaga pendidik kurikulum pendidikan perdamaian yang mereka sudah kuasai saat menjalani program deradikalisasi. Kementerian Sosial dan yang lainnya dapat membantu program ini karena kementerian ini pun salah satu tugasnya adalah memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat yang sifatnya non-pendidikan formal. Untuk sementara, para pendidik ini akan ditampung di kementerian ini untuk nantinya diterjunkan langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk memberikan edukasi tentang perdamaian.

Kementerian Sosial misalnya, dapat memberikan wadah bagi mereka melalui program-program sosial yang banyak dilakukan kementerian dalam upayanya memberikan penyuluhan dan pendidikan bagi masyarakat umum. Selain itu, para pendidik ini juga dapat disebarluaskan ke daerah-daerah melalui dinas sosial-dinas sosial daerah, untuk nantinya ikut terlibat dalam program-program sosial dinas sosial daerah tersebut. Hal yang sama juga berlaku bagi kementerian/lembaga pemerintah lainnya yang mempunyai program serupa.

Penulis melihat bahwa upaya memberdayakan para mantan tahanan terorisme seperti ini akan sangat berguna dalam menyelesaikan polemik persoalan tentang bagaimana nasib para tahanan terorisme setelah mereka bebas. Dana yang dibutuhkan pun tidak banyak karena dasarnya mereka hanya “numpong” pada program-program kementerian yang sudah ada. Dampak positifnya pun akan semakin banyak, terutama citra pemerintah di mata masyarakat, bahwa ternyata program deradikalisasi sangat berhasil. Tidak hanya dengan menghilangkan paham kekerasan dan teror yang ada pada pelaku, tetapi juga sampai menjadikan mereka berbalik 180 derajat menjadi orang-orang yang mengajarkan budaya damai dan perilaku yang baik kepada masyarakat. Selama ini program pemasyarakatan di Indonesia dinilai kurang baik, penulis merasa pendidikan perdamaian dalam program deradikalisasi dapat menjadi salah satu upaya perbaikan bagi program pemasyarakatan tersebut.

Salah satu tahap pelaksanaan deradikalisasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah mengimplementasikan salah satu dari desain komponen deradikalisasi, yaitu resosialisasi. Menurut Agus Surya Bakti, sebelum masuk ke tahapan resosialisasi,

para napi harus terlebih dahulu mengikuti tahap pertama dan kedua, yaitu rehabilitasi dan reedukasi.²⁸ Ketika dua tahapan tersebut sudah dilalui, maka tahapan ketiga adalah resosialisasi tadi. Di sinilah pendidikan perdamaian dapat berperan sebagai kurikulum yang mempersiapkan para napi teroris sebagai tenaga-tenaga pendidik pendidikan perdamaian di masyarakat.

Sebelumnya kita pahami dulu sedikit banyak tentang tahap ketiga dari program deradikalisasi ini. Sedikit penjelasan tentang tahapan ini sudah disinggung di bagian awal tulisan, akan tetapi program resosialisasi memang lebih dimaksudkan sebagai keseluruhan upaya mengembalikan napi teroris agar dapat hidup dan berinteraksi dengan masyarakat secara baik. Resosialisasi juga berarti proses untuk mempersiapkan napi teroris, terutama dalam hal perubahan pemahaman dan sikap radikal teroris, agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.²⁹

Secara khusus, resosialisasi adalah upaya pembinaan kepribadian dan kemandirian yang integratif untuk mengembalikan mereka sebagai warga masyarakat yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan psikologis, yaitu untuk membangun rasa percaya diri, bergaul, dan berinteraksi dengan masyarakat secara keseluruhan. Pembinaan keagamaan untuk memperkuat pemahaman dan pengalaman ajaran agama yang moderat, damai, dan menghargai perbedaan. Sedangkan pembinaan kemandirian memberikan pelatihan-pelatihan keahlian sesuai dengan minat dan bakat para napi agar dapat dipergunakan untuk melanjutkan kehidupan mereka selepas penjara nanti.

Pembinaan kemandirian adalah tempat di mana pendidikan perdamaian dapat masuk, terutama konten tentang bagaimana memasukkan muatan-muatan pendidikan yang optimal bagi para napi. Menurut Castro dan Galace, seorang pendidik pendidikan perdamaian harus mampu mengembangkan keterampilan dan kualitas mereka yang diajarnya dalam sebuah lingkungan pendidikan yang damai (*peaceable*). Untuk itu, para pendidik harus mengalami transformasi personal terlebih dahulu agar mereka mampu menjadi agen-agen pembawa pesan damai yang kredibel.³⁰

²⁸ Bakti (a), *op.cit*, hlm. 200-204.

²⁹ *Ibid*, hlm. 204-205.

³⁰ Casto-Galace, *op.cit*, hlm. 185.

Seperti sudah disinggung sebelumnya, dalam program deradikalisasi, transformasi personal tentunya adalah hasil dari proses deideologi, maupun rehabilitasi dan reedukasi. Para napi teroris, dari yang tadinya didoktrin untuk kejam, tak berperasaan, dan penuh kekerasan, sudah mengalami proses indoktrinasi ulang. Setelah belajar toleransi dan saling menghargai sesama manusia, mereka berubah menjadi orang yang cinta damai. Kondisi ini dapat dimanfaatkan sebagai cikal bakal pendidikan pendidikan perdamaian, khususnya untuk kelak menjadi tenaga pendidik di masyarakat. Lebih lanjut, Lantieri dan Patti mengatakan bahwa seorang pendidik adalah seorang yang harus mentransformasikan dirinya terlebih dulu, sebelum mereka dapat meminta orang lain berubah (orang yang diajarkannya).³¹ Sebagai contoh, ketika ingin meminta para murid untuk menghadapi prasangka mereka terhadap orang lain, si pendidik harus terlebih dahulu tidak berprasangka kepada orang lain juga.

Atas dasar itu, apa yang diperlukan untuk mendidik seorang mantan napi teroris agar dapat menjadis seorang tenaga pendidik pendidikan perdamaian yang baik. Menurut Betty Reardon, seorang tenaga pendidik perdamaian yang baik harus memiliki beberapa karakteristik di bawah ini:³²

1. Memahami bahwa pendidikan adalah sarana perubahan yang konstruktif;
2. Dimotivasi oleh pelayanan dan aktif dalam komunitas;
3. Bertanggung jawab kepada masyarakat;
4. Toleran, terbuka, dan menghormati gagasan dan pemikiran orang lain;
5. Sangat bersemangat dalam mengembangkan budaya damai, adil, dan imparsial;
6. Pembelajar abadi, yang terus belajar untuk mengembangkan kemampuannya;
7. Terus mencari hubungan yang bersahabat, mutual, menghormati hak asasi manusia, harga diri orang lain, dan ramah jender agar budaya damai dapat terus dikembangkan;
8. Bersikap kritis, tidak untuk membahayakan atau menyerang pihak lain, tetapi untuk menimbulkan perubahan yang konstruktif;

³¹ Linda Lantieri dan Janet Patti, *Waging Peace in Our Schools*, (Boston: Beacon Press, 1996), hlm. 56.

³² Betty Reardon, *Education for a culture of Peace in Gender Perspective*, (Paris: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, 2001), hlm. 45-46.

9. Pendidik pendidikan perdamaian harus mengenal masing-masing individu yang diajarkannya. Hal ini karena setiap individu yang diajarkan memiliki karakter yang berbeda, untuk pengajar pendidikan perdamaian harus memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi setiap individu. Metode ini sangat berguna karena mengajarkan perdamaian berarti harus siap dengan segala perbedaan yang ada dan mungkin timbul;
10. Pengajar pendidikan perdamaian harus mampu merangsang siswanya untuk banyak mengajukan pertanyaan;
11. Harus memiliki kemampuan komunikasi dan resolusi konflik yang baik.

Menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi BNPT, dalam hal ini apabila kurikulum pendidikan perdamaian dimasukkan dalam program deradikalisasi, khususnya di bagian resosialisasi. Tantangannya adalah menyiapkan tenaga-tenaga pengajar untuk mengajarkan para napi teroris tersebut. Apalagi, melihat kriteria dari Reardon di atas, mentransformasi seorang napi teroris menjadi seorang yang pas dengan poin-poin di atas, pastinya menjadi tugas yang maha sulit. Belum menjadi jaminan jika sumber daya manusia yang dimiliki BNPT untuk program deradikalisasi ini siap untuk mengajarkan materi tersebut. Pendidikan perdamaian adalah sebuah khazahah ilmu baru, tidak hanya di kalangan BNPT, bahkan juga di negara ini.

Berangkat dari masalah itulah, untuk mengajarkan para napi terorisme yang akan menjadi pendidik-pendidik pendidikan perdamaian, maka dalam program deradikalisasi yang bermuatan pendidikan perdamaian, peran perguruan tinggi sebagai tutor-tutornya sangat dibutuhkan. Sampai saat ini, baru dua universitas di Indonesia yang membuka program studi damai dan resolusi konflik. Kedua kampus itu adalah Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan). Sebagai alumni Program Studi Damai dan Resolusi Konflik (DRK) Unhan, penulis merasa bahwa Prodi DRK dapat diberdayakan sebagai tutor bagi pendidikan perdamaian yang akan diajarkan sebagai salah satu materi dalam program deradikalisasi.

Sebagai alumni prodi tersebut, penulis paham betul bahwa materi pendidikan perdamaian sangat bisa diintegrasikan ke dalam program deradikalisasi, apalagi dengan

Prodi DRK sebagai tutornya. Materi pendidikan perdamaian sendiri ketika diajarkan di dalam Prodi DRK, dimasukkan ke dalam beberapa mata kuliah, seperti “*Nature of Conflict*”, “*Conflict Intervention*”, dan “*Socio-Cultural Competence and Resilience*”. Kajian terorisme sendiri menjadi salah satu *concern* prodi ini karena arahnya adalah membahas gerakan radikal yang berpotensi menjadi konflik vertikal, horisontal, sampai konflik antarnegara (*extra state*).

Dalam penjelasan di atas, BNPT dalam merumuskan program deradikalisasi ini belajar dari negara Belanda, dimana mereka merasa perlu melibatkan perguruan tinggi sebagai salah satu mitra kerjanya. Dalam kesempatan ini, penulis juga merasa bahwa Unhan dapat dilibatkan dalam program deradikalisasi yang dibentuk oleh BNPT sebagai lembaga yang memberikan masukan akademis bagi konten dan muatan-muatan ilmiah yang bisa dimasukkan sebagai metode deradikalisasi. Sesuai konteks tulisan ini, metode deradikalisasi yang dimaksud tentu saja kurikulum pendidikan perdamaian.

Kesimpulan

Deradikalisasi adalah bagian dari strategi kontra terorisme. Deradikalisasi dipahami sebagai bagian dari sebuah cara merubah ideologi kelompok teroris secara drastis. Perubahan drastis ini berwujud bukan hanya individu yang terbebas dari tindakan kekerasan, namun juga melepaskan diri dari kelompok radikal yang menaunginya selama ini. Sedangkan, pendidikan perdamaian adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk menanggapi masalah-masalah yang terkait konflik dan kekerasan, yang berskala global dan nasional menuju ke skala yang lebih kecil, yaitu lokal dan personal.

Mempromosikan budaya anti-kekerasan menjadi salah satu materi utama pendidikan perdamaian yang diusulkan masuk ke dalam program deradikalisasi. Bicara kekerasan, tindakan terorisme selalu bermuara pada hal tersebut. Bom, penembakan, sampai teror melalui media menjadi contoh kekerasan fisik, maupun psikis. Dalam program deradikalisasi, nuansa kekerasan ini harus dihilangkan agar seorang napi teroris dapat kembali ke jalan yang benar.

Kurikulum pendidikan perdamaian harus diintegrasikan secara suportif ke dalam program deradikalisasi. Pendidikan perdamaian bisa dimasukkan ke dalam kegiatan-

kegiatan seperti menonton film yang terkait upaya-upaya perdamaian, atau juga berdiskusi dengan tokoh agama lain, di mana hal tersebut dapat mengajarkan sikap toleransi beragama dan anti-kekerasan.

Pendidikan perdamaian juga akan efektif diintegrasikan ke dalam program deradikalisasi jika keluaran hasilnya pun dapat bermanfaat. Program deradikalisasi tidak boleh hanya selesai ketika si napi keluar dari tahanan, melainkan harus terus menerus dibina secara kontinu. Program deradikalisasi harus membuat kurikulum yang berguna bagi pengembangan *soft* maupun *hard skill* mereka, yang dapat mereka gunakan jika sudah bebas nanti. Disini pengembangan kurikulum pendidikan perdamaian dalam program deradikalisasi menjadi penting karena mereka akan diajarkan bagaimana caranya untuk menjadi pendidik-pendidik pendidikan perdamaian di masyarakat.

Berangkat dari itulah, untuk mengajarkan para napi teroris yang akan menjadi pendidik-pendidik pendidikan perdamaian, maka dalam program deradikalisasi yang bermuatan pendidikan perdamaian, peran perguruan tinggi sebagai tutor-tutornya sangat dibutuhkan. Penulis juga merasa bahwa Unhan dapat dilibatkan dalam program deradikalisasi yang dibentuk oleh BNPT sebagai lembaga yang memberikan masukan akademis bagi konten dan muatan-muatan ilmiah yang bisa dimasukkan sebagai metode deradikalisasi.

Daftar Pustaka

Buku

- Bakti, Agus Surya (a). 2014. *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*. Jakarta: Daulat Press.
- Bakti, Agus Surya (b). 2014. *Merintis Jalan Mencegah Terorisme (Sebuah Bunga Rampai)*. Jakarta: Semarak Lautan Warna.
- Crenshaw, Martha. 2003. "Pertanyaan yang Harus Dijawab, Riset yang Harus Dikerjakan, Pengetahuan yang Harus Diterapkan", dalam Walter Reich (ed). *Origins of Terrorism: Tinjauan Psikologi, Ideologi, Teologi, dan Sikap mental*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hendropriyono, Abdullah Mahmud. 2009. *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Kompas.
- Lantieri, Linda dan Janet Patti. 1996. *Waging Peace in Our Schools*. Boston: Beacon Press.
- Navaro-Castro, Loreta dan Jasmin Nario-Galace. 2010. *Peace Education: A Pathway to a Culture of Peace*. Quezon City: Center for Peace Education.

Reardon, Betty. 2001. *Education for a Culture of Peace in Gender Perspective*. Paris: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization.

Thornton, Rod. 2007. *Asymmetric Warfare: Threat and Response in the 21st Century*. UK: Polity Press.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. 2005. *Peace Education: Framework for Teacher Education*. New Delhi: UNESCO.

Website

Wisnumurti, A.A. G. Oka, “Mengelola Nilai Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama”, dalam <http://www.yayasankorpribali.org/artikel-dan-berita/59-mengelola-nilai-kearifan-lokal-dalam-mewujudkan-kerukunan-umat-beragama.html>, diunduh pada 18 Maret 2013.